

**KAPASITAS PENGHULU DALAM MEMOBILISASI MODAL SOSIAL
PADA PEMBANGUNAN DESA BANGKO PUSAKA,
KECAMATAN BANGKO PUSAKO, KABUPATEN ROKAN HILIR
PADA TAHUN 2015-2016**

By: Vicky Nanda Putra

Email Address : Vicky14tm@mahasiswa.pcr.ac.id

Supervisor: Dr. Khairul Anwar, M.Sc.

Government Science Department, Social Sciences, University of Riau
Bina Widya Campus Jl. H.R.Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-6277

Abstract

The capacity of Pemulu in mobilizing social capital in village development in Bangko Pusaka is an attempt by the author to look at the extent of the role of the village head or headman in carrying out his duties in building community resources and in the development of the Bangko Pusaka Village infrastructure. In this case, to see the capacity of the Bangko Pusaka Leader, the writer uses a social capital approach that consists of several principles, namely: Trust, Network, and Norm. The aim of the research is first, to describe the capacity of the first managerial in mobilizing social capital in development in Bangko Pusaka village. Second, Describe the political capacity of the prince in mobilizing social capital in development in Bangko Pusaka Village.

The type of research that I use in this case is a type of descriptive research with qualitative analysis methods. Research location in Bangko pusaka village. Interview data collection techniques and documentation. While data analysis is done by qualitative analysis. The author uses triangulation as a technique to check the validity of data. The results of this study indicate that the Managerial Capacity and political capacity of the Bangko Pusaka leaders in general are not good enough. Due to the low level of education and experience of the prince. Likewise social capital (Network, Trust and Norms) The potential is in the Kepenghuluan Bangko Pusaka, except that in this case there is a failure of the leader in mobilizing social capital in the community resulting in problematic development, and community distrust towards the person of the headman.

Keywords: Governability, Social Capital, Development.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 10 Tahun 2015 Tentang Perangkat Kepenghuluan, Pada pasal 1 Menjelaskan bahwa Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan masyarakat berdasarkan hak asal usul yang diakui didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan penghulu. Untuk Lokasi Penelitian Penulis adalah berada di Kepenghuluan Bangko Pusaka. pada Tahun 2014 Kepenghuluan Bangko Pusaka tidak ada mendapatkan ADD maupun DD seperti sekarang ini, adapun anggaran yang mereka dapatkan dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupa dana Operasional Kepenghuluan dan Honor para Perangkat Desa. Dalam hal pembangunan pada saat itu, desa hanya mengajukan kepada pemerintah daerah melalui proses Musrenbang dan keluarnya pembangunan tersebut melalui APBD kabupaten Rokan Hilir, bukan berupa anggaran ADD seperti sekarang ini. Pada Tahun 2015 Kepenghuluan Bangko Pusaka baru mendapatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang didapat oleh kepenghuluan semenjak terbit nya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa. semenjak itulah kepenghuluan bangko pusaka bisa menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam Pembangunan Desa.

Terkait dengan Kapasitas Penghulu, berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat 1 tentang Kewenangan kepala desa atau Penghulu Antara lain: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan Aturan diatas, Sebenarnya peranan modal sosial menentukan bagaimana Menyelenggarakan arah Pembangunan desa ke depan. Modal Sosial merupakan serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Sedangkan Pembangunan Desa adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah desa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dengan harapan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana. Hal yang terjadi di desa bangko pusaka yaitu karena adanya kegagalan penghulu dalam memobilisasi modal sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat, maka dampaknya yaitu pembangunan desa menjadi terganggu, serta penghulunya mengalami *distrust* dari masyarakat bangko pusaka itu sendiri. Berkaitan dengan kapasitas seorang penghulu, maka konsep yang penulis gunakan yaitu *governability*.

Governability adalah kemampuan pemerintah untuk memfungsikan lembaga-lembaga demokrasi yang ada sehingga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat¹. *Governability* menurut Teori Sutoro Eko, terungkap adanya perpaduan antara Kapasitas Managerial yang berkaitan dengan Kinerja dan Kapasitas Politik yang berkaitan dengan Legitimasi. Berdasarkan kewenangan kepala desa atau nama lainnya penghulu terkhususnya didesa bangko pusaka. Beberapa kewenangan diatas serta asas penyelenggaraan pemerintah desa diatas, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penghulu sebagai seorang kepala desa yang memiliki kapasitas untuk itu. Untuk itulah sangat perlu untuk dilihat bagaimana kapasitas penghulu tersebut dalam memobilisasi modal sosial dalam pembangunan desa.

Berdasarkan Identifikasi masalah-masalah dilapangan melalui Observasi penulis dan Wawancara dengan Pihak Aparatur desa dan masyarakat setempat. Terdapat beberapa persoalan yang terjadi di kepenghuluan bangko pusaka pada saat kepemimpinan penghulu alfian pada tahun 2015-2016 atas kapasitasnya sebagai kepala desa dalam pembangunan desa di desa bangko pusaka. Sebagai berikut: *Pertama*, Ketidakterbukaan (Transparansi) penghulu dalam Pengelolaan dana desa, Pada saat Pelaporan penggunaan dana desa pada tahun 2015-2016 terhadap masyarakat desa bangko pusaka. Tentunya hal ini melanggar Norma (*Norm*) atau aturan-aturan yang ada yang berasal dari pemerintah melalui

undang-undang dll. Hal ini termasuk dalam kegagalan beliau dalam menjalankan aturan yang ada. *Kedua*, Adanya Kegagalan Penghulu dalam membangun *Trust* (Kepercayaan) di dalam masyarakat terhadapnya pada saat beliau menjadi kepala desa, sehingga imbasnya pada saat pemilihan penghulu pada tahun 2017 dan beliau mengalami kekalahan. *Ketiga*, Adanya Bangunan-Bangunan Desa yang dibangun dan tidak bisa di fungsikan dengan baik. seperti Posyandu di dusun pematang semut dan 3 buah Sumur Bor yang memakan dana yang besar, akan tetapi tidak bisa digunakan dengan baik hingga hari ini. Tentunya hal ini sangat disayangkan dan kesalahannya terdapat pada saat proses perencanaan pembangunan yang tidak matang. Dan dalam hal ini desa mengalami kerugian dan tetap hal ini harus menjadi tanggung jawab penghulu kapasitasnya sebagai kepala desa bangko pusaka.

Dari beberapa persoalan di atas lah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti dan mengangkat judul penelitian "*Kapasitas Penghulu dalam Memobilisasi Modal Sosial pada Pembangunan Desa di Bangko Pusaka Tahun 2015-2016*". Untuk Rumusan Masalah yang penulis gunakan pertama, Bagaimanakah Kapasitas Managerial Penghulu dalam Memobilisasi Modal Sosial pada pembangunan di Desa Bangko Pusaka Tahun 2015-2016. Kedua, Bagaimana Kapasitas Politik penghulu dalam Memobilisasi modal sosial pada pembangunan di Desa Bangko Pusaka Tahun 2015-2016. Ketiga, Bagaimana Kapasitas

¹ Sutoro Eko. Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan

Kesejahteraan, (Yogyakarta: IRE, 2013), hlm.65.

Penghulu dalam Memobilisasi Modal Sosial di Desa Bangko Pusaka Tahun 2015-2016.

Pada Tinjauan Pustaka yang ada di dalam Studi Terdahulu, penelitian yang penulis gunakan adalah Berikut ini adalah: "Pengaruh Modal Sosial Masyarakat Pedesaan Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa" yang dilakukan oleh Meditran R. Ontorael Telly Sondakh, Alden Laloma yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Masalah Penelitian nya adalah Bagaimana Tingkat keberhasilan pembangunan di desa-desa dalam wilayah kecamatan Pineleng, Seberapa besar pengaruh modal sosial masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Metode Penelitian nya Kuantitatif dan Kualitatif. Hasil Penelitian adalah Terjalannya sinergi antara Kantor Kecamatan Pineleng dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan di Kecamatan Pineleng secara terpadu.

Adapun Kerangka Teori yang penulis gunakan adalah Pertama, *Governability* adalah kemampuan pemerintah untuk memfungsikan lembaga-lembaga demokrasi yang ada sehingga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat². Secara teoritik ada lima bentuk kapasitas pemerintah. Pertama, kapasitas ekstraktif, yaitu kemampuan pemerintah untuk memobilisasi berbagai sumber daya maupun mengembangkan potensi lokal.

Kedua, kapasitas regulatif, yaitu kemampuan pemerintah merumuskan kerangka aturan main terhadap pengelolaan otonomi yang sesuai dengan prefensi lokal. Ketiga, kapasitas distribusi, yaitu kapasitas pemerintah dalam membagi kekuasaan, peran, tanggung jawab dan sumber daya kepada seluruh *stakeholders*. Keempat, kapasitas responsif, yaitu kemampuan pemerintah untuk memberikan tanggapan terhadap perubahan cara pandang, kondisi serta aspirasi dan preferensi masyarakat lokal. Kelima, kapasitas linkage/symbolis, yaitu kemampuan pemerintah dalam mengembangkan jaringan, kerjasama/kemitraan secara lokal, nasional maupun internasional, guna mendukung kapasitas-kapasitas lainnya serta kemampuan dalam mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan baik intra maupun ekstra masyarakat. contoh output simbolik misalnya pameran kekuatan dan upacara militer, maupun kunjungan pejabat daerah maupun pejabat pusat.³

Kedua, Modal Sosial (Francis Fukuyama) menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern⁴. Modal Sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokrasi. Berbagai permasalahan dan penyimpangan yang terjadi diberbagai negara determinan utamanya adalah kerdilnya modal sosial yang tumbuh ditengah masyarakat.

²Agus, Dwiyanto. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, (yogyakarta:Penerbit Gava Media, 2010), hlm.26

³ Sutoro Eko, *Op.cit.*, hlm.170

⁴ Nyoman Utari Vipriyanti, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, dan menghalangi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep Modal Sosial (*Social Capital*) menjadi Salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia dalam model ini manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan di daerah. Merujuk pada Ridell (1997), ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*).⁵

Sedangkan yang ketiga adalah Pembangunan Desa, Pembangunan Sering dikonsepsikan sebagai upaya dalam merubah dari suatu kondisi sosial ke kondisi sosial yang lain yang dianggap lebih baik oleh pihak-pihak (sebut saja agen pembangunan) yang ingin melakukan perubahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata disusun dalam kategori berdasarkan klarifikasinya. Menurut Miles dan

Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan⁶.Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data⁷.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian ini dilaksanakan dengan teknik wawancara dan dokumentasi berdasarkan Teori Sutoro Eko. Sutoro Eko menjelaskan bahwa cara kerja *governability* terungkap adanya perpaduan antara kapasitas managerial (Teknokratik) dan kapasitas politik seorang pemimpin dalam mengelola manajemen pemerintahan. Cara kerja *governability* mengandung dua unsur yaitu politik dan manajemen. Secara Politik ia berkaitan dengan legitimasi, dan secara managerial ia berkaitan dengan kinerja. Ada pun fokus penelitian penulis ini, terletak pada kinerja penghulu dalam memobilisasi modal sosial pada pembangunan desa bangko pusaka.

APBKep Bangko Pusaka Tahun 2015

⁵ *Ibid.*, hlm 13.

⁶ Ulber Silallahi, *Op. Cit.*, hlm.339.

⁷ Lexy J Moloeng, *Op. Cit.*, hlm.330.



(Jumlah Belanja : Rp. 1.665.499.062,71) (Surplus : Rp. 12.059.999,74)

(Total Anggaran:
Rp.1.677.559.062,45)

**Rincian Pembangunan
Desa Bangko Pusaka Tahun 2015**

No	Rincian Pelaksanaan Bidang Pembangunan	Jumlah Anggaran
1	Pembuatan 5 Unit Sumur Bor	Rp. 84.440.500
2	Pembangunan Box Culvert jalan Rotan	Rp. 49.428.400
3	Pembangunan Box Culvert Jalan P.Moawan	Rp. 49.428.400
4	Pembangunan Box Culvert Jalan Bengkuang	Rp. 50.684.900
5	Pembangunan Box	Rp. 66.301.000

	Culvert Jalan P.Loban	
6	Semenisasi Jalan Abdul Rajab	Rp. 139.157.500
7	Pembangunan Box Culvert Jalan Kanopan	Rp. 45.173.100
8	Pembangunan Box Culvert Jalan Armada	Rp. 33.440.100
9	Pembuatan Tempat Parkir dan Pemasangan Terali	Rp. 34.691.430
10	Pembangunan MCK Paud Tunas Pusaka	Rp. 42.503.090
11	Pembangunan Pagar Kantor Penghulu	Rp. 165.515.000
12	Semenisasi TPU	Rp. 52.437.000

	P.Marakelua ng	
13	Semenisasi TPU Mulya Makmur	Rp. 65.527.000
14	Pembangun an Posyandu P.Semut	Rp. 46.003.000
	Total Anggaran Pembangun an Tahun 2015 :	Rp. 934.511.343, 71

*Sumber Data: Olahan Penulis
Tahun 2018*

Pada tahun 2015, ada beberapa bangunan desa yang bermasalah hingga hari ini sehingga tidak bisa difungsikan dengan baik. Yaitu bangunan posyandu pematang semut dan 3 buah sumur bor, yang mana dalam hal ini ditaksir kerugian desa bangko pusaka mencapai kurang lebih Rp.50.000.000 Rupiah. Tentunya hal ini tetap menjadi tanggung jawab penghulu sebagai orang yang memiliki kapasitas sebagai seorang kepala desa dibangko pusaka.

Pada bagian ini, penulis akan mengulas tentang kapasitas managerial penghulu bangko pusaka pada tahun 2015-2016. Kepala desa atau nama lainnya penghulu merupakan simpul kunci dalam keberhasilan pembangunan pada suatu desa. Kinerja kepala desa dapat dikatakan meningkat jika memenuhi indikator-indikator, antara lain Tingkat Pendidikannya (Keahlian), Disiplin (Profesionalisme), dan kualitas hasil kerja "Prestasi" (Keterampilan Kerja). Untuk indikator keahlian sendiri, penulis menggunakan parameter yaitu tingkat

pendidikan penghulu. Dimana hasil penelitian penulis sebagai berikut:

Biodata Penghulu Bangko Pusaka

“ Biodat a “	“ Riwayat Pendidik an “	“ Riwayat Pengalam an “
Nama : ALFIAN	SD : SD Inpres 3/77 Teluk Pulau 1982.	2005-2010 KAUR Trantib di Kepenghulu an B.Pusaka
TTL : Teluk Pulau, 27 Agustu s 1968	SMP : Paket B PKBM Tunas Harapan Simpang Benar 2010	2011-2017 Penghulu B. Pusaka
Jenis kelami n : Laki- Laki	SMA : Paket C PKBM Selasih Teluk Pulau Hulu 2013.	

Berdasarkan tingkat pendidikan serta pengalaman beliau di atas, sebenarnya menjadi sebuah rasionalisasi ketika pembangunan di Desa Bangko pusaka prestasinya kurang dan begitu saja dari dulunya. Karena dari segi pendidikan beliau dari tabel di atas tamat SD saja yang dari awal hingga akhir, sementara dalam menamatkan SMP hingga SMA nya mengikuti ujian paket saja, dimana hanya untuk mendapatkan ijazah semata, tanpa mengikuti alur kegiatan sekolah dari awal hingga akhir (Tamat).

Dalam hal ini, penulis ingin mengukur seberapa besar tingkat profesionalisme kepala desa/Penghulu Bangko Pusaka

menggunakan parameter Kedisiplinan dan Keteladanan yang telah diterapkan oleh penghulu desa bangko pusaka pada saat kepemimpinan nya. Karena kedisiplinan seorang penghulu juga berpengaruh besar pada kinerja perangkat desa tersebut. Hasil dari penelitian penulis, atas disiplin penghulu alfian sebagai berikut:

“ kalo kedisiplinan beliau untuk hadir itu mantap, bahkan lebih dulu terkadang beliau datang dari pada anggota nya termasuk saya. Terkadang karena melihat pimpinan begitu, saya beserta rekan-rekan yang lain jadi malu untuk datang terlambat. Mengenai keteladanan, beliau lumayan lah untuk bisa di jadikan panutan”.(**Wawancara dengan Sekretaris desa Bapak Saparudin, 30 September 2018).**

Sedangkan untuk keterampilan kerja nya, parameter yang penulis gunakan adalah prestasi penghulu bangko pusaka dan keterampilan berbicaranya. Adapun yang dimaksud dengan prestasi kerja adalah suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya⁸. Berdasarkan hasil wawancara, kecakapan beliau dalam berkomunikasi sebagai berikut:

untuk keterampilan berkomunikasinya, Menurut Tokoh Masyarakat bernama Bapak Anto,

keterampilan penghulu dalam berkomunikasi dengan masyarakat sebagai berikut :

“Keahlian Dalam hal kecakapan berkomunikasi dengan masyarakat melalui forum musyawarah maupun dalam sehari-harinya ya baguslah dan dapat di mengerti dan diterima oleh masyarakat banyak”.
(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Anto, 2 Oktober 2018).

Selanjutnya Penulis akan berbicara mengenai kapasitas politik Penghulu Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2015-2016. Semangat Otonomi Daerah dengan System Desentralisasi hari ini tentunya memberikan angin segar bagi pemerintah desa untuk menjalankan kewenangan yang telah di limpahkan kepada desa berdasarkan prakarsa masyarakat yang ada. Tentunya, dalam menjalankan kewenangan nya tersebut, Penghulu/Kepala Desa membutuhkan legitimasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Indikator yang penulis gunakan dalam melihat kapasitas politik penghulu ada 3 yaitu: Kapasitas Responsif, kapasitas regulatif, dan kapasitas simbolik.

Pertama: Kapasitas *Responsif* yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan berupa tuntutan baik dari lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat. penulis menggunakan parameter seberapa

⁸ *Ibid.*,hlm:147

besar responsifitas penghulu dalam mengakumulasi Daftar Kebutuhan Desa. menurut penghulu Alfian dalam penyusunan daftar kebutuhan desa. sebagai berikut:

“Penyusunannya ada pada rapat musrenbangdes sebelum dibawa pada musrenbangdes kepala dusun bersama RT/RW beserta tokoh pemuda dan tokoh agama yang ada di sekitar dusun tersebut. File nya tidak pernah sampai ke kami, karena itu hanya pada tingkat dusun saja. Dan kami tetap akomodir aspirasi apa-apa saja yang mereka sampaikan.” (Wawancara dengan Penghulu Alfian, 30 September 2018)

Di samping itu, perihal mengenai tahapan penyusunan daftar kebutuhan desa ini, juga senada dengan apa yang di sampaikan oleh Sekretaris desa bahwa:

“Penghulu dalam merespon aspirasi masyarakat melalui daftar kebutuhan desa ya baguslah di akomodirnya semua keinginan masyarakat. langkahnya penyusunan RPJMDes setelah itu Penyusunan RKPDes dan Musrenbang. Sebelum itu ada Musdus dimana di dalam nya kepala dusun beserta RT/RW maupun tokoh-tokoh masyarakat. hanya saja yang menjadi persoalan nya adalah pada saat musdus itu tidak dilaksanakan pembuatan daftar kebutuhan desa tersebut oleh Kepala Dusun.

realitanya Pada saat musrenbangdes tersebut lah secara langsung mereka sampaikan aspirasi mereka yang ada. Dan itu pun dalam forum tersebut harus kami yang mendorong mereka untuk menyampaikan Aspirasi-aspirasi terkait kebutuhan masyarakat desa. jika tidak begitu ya mereka tidak tau apa yang mereka butuhkan, karena faktor lemah nya pendidikan dan pengalaman juga menjadi persoalan disini”. (Wawancara dengan Bapak Saparudin sebagai sekretaris desa, 30 September 2018)

Kedua, Kapasitas *Regulatif* yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada didalamnya, maka dibutuhkan adanya pengaturan atau norma⁹. Parameter yang penulis gunakan untuk kapasitas *Regulatif* ini adalah Produk Peraturan Desa. hasil wawancara penulis dengan penghulu sebagai berikut:

“Peraturan desa yang kami buat bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kependhuluan selama saya menjabat itu hanyalah berupa peraturan desa tentang APBKEP hanya itu saja. Yang lainnya tidak ada.” (Wawancara dengan Penghulu Alfian, 30 september 2018)

Sebenarnya desa yang maju merupakan desa yang memiliki

⁹ *Ibid.*, hlm. 378.

beraneka ragam produk aturan yang telah di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan penghulu. Disamping itu, tanggapan dari ketua BPKep atas produk peraturan desa, sebagai berikut:

“Kurang nya pengetahuan kami tentang tugas dan fungsi BPKep itu sendiri. Salah satunya dalam hal pembuatan atau produk hukum berupa Perdes juga minim kami hasilkan. selama masa kepengurusan saya sebagai ketua BPKep, karena memang kami ni tidak lah memiliki pengalaman yang banyak dan pendidikan yang masih rendah. Hanya satu Perdes yang kami hasilkan itu pun mengacu pada tahun-tahun

sebelumnya Perdes tentang APBKep”. (Wawancara dengan **Bapak M.Zulkarnain sebagai ketua badan permusyawaratan kepenghuluan , 4 oktober 2018).**

Ketiga, yaitu Kapasitas Simbolik Kapasitas Simbolik yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat. Kapasitas simbolik penghulu bangko pusaka dari berbagai kunjungan yang hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bangko pusaka dari tahun 2015-2016. Berikut tabel tamu khusus desa bangko pusaka :

Daftar

Tamu Khusus Desa Bangko Pusaka.

No	Waktu	Nama	Jabatan	Agenda
1	16 April 2015	IPDN	Mahasiswa	Membantu dalam Membuat monografi & Adm desa.
2	28 Juni 2015	Dinas Perkebunan	Anggota OPD Provinsi Riau	Sosialisasi dan memberikan bantuan bibit karet.
3	30 Februari 2016	Dinas Peternakan	Anggota OPD Kab. Rohil	Sosialisasi dan Bantuan Bibit ikan
4	29 Juli 2016	Dedi Humadi	Wakil Ketua DPRD Rohil	Reses/Penjemputan Aspirasi.

Sumber data: Olahan Penulis Tahun 2016

Selanjutnya, Kapasitas Penghulu dalam Memobilisasi Modal Sosial, Francis Fukuyama Mengartikan Modal Sosial sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat yang terdapat didalam suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara mereka¹⁰. Menurut Robert Putnam Membagi Modal Sosial itu Ke dalam 3: Yaitu

¹⁰ Nyoman Utari Vipriyanti.,
Op. Cit, hal:20.

adanya Kepercayaan/*Trust*, Norma/*Norm* dan Jaringan/*Network* yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain¹¹.

Pertama, Jaringan (Network) adalah Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia Menurut Robert D Putnam¹². Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh.

Potensi Jaringan di Desa Bangko Pusaka



Berdasarkan has

il wawancara penulis dengan tokoh masyarakat atas jaringan yang dibangun oleh penghulu alfian sebagai berikut:

“ mengenai jaringan yang beliau bangun dengan masyarakat ya bagus, apalagi terkhususnya pemuda, beliau dekati dengan kegiatan olahraga-olahraga, karena beliau juga hobi itu. Untuk orang tua beliau dekati melalui pengajian-pengajian Dan pada saat musrenbang, masyarakat juga dilibatkan.

di samping itu, ketika ada masyarakat yang sedang sakit butuh bantuan dan beliau juga cepat dalam merespon “. **(Wawancara dengan tokoh masyarakat bapak anto, 2 Oktober 2018).**

Kedua adalah Kepercayaan, menurut France Fukuyama adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang di

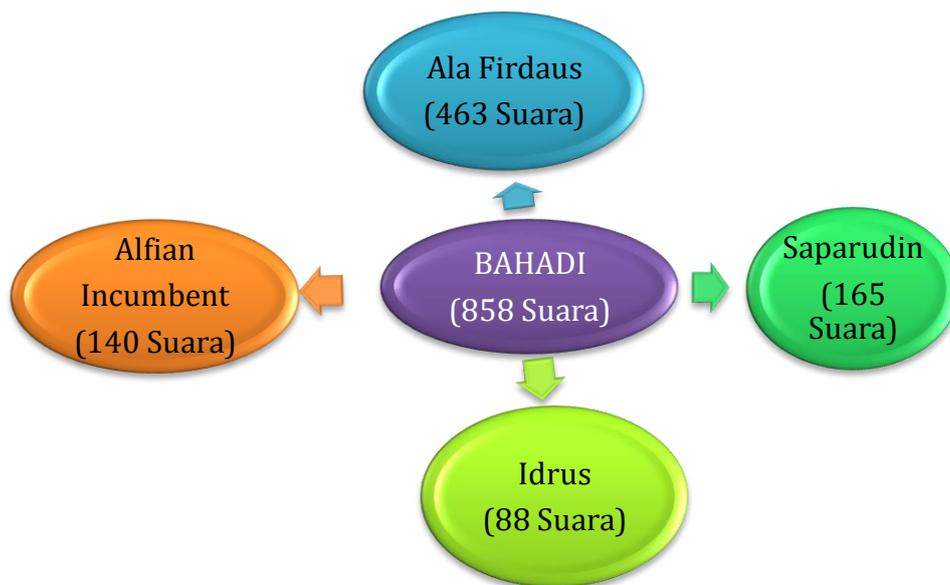
¹¹ *Ibid.*, hal: 32.

¹² *Ibid.*, hal: 15.

anut bersama¹³. Hasil wawancara penulis dengan sekretaris desa atas kepercayaan yang dibangun oleh penghulu alfian sebagai berikut:

“pasti erat kaitan nya dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau. Banyak orang tidak puas atas pelayanannya kepada masyarakat. Saya semenjak ada konflik dengan beliau, ya tidak banyak ambil andil lagi. Karena secara langsung ia yang ambil tiap-tiap keputusan tersebut. Disamping itu masyarakat

Perolehan Suara Pemilihan Penghulu Tahun 2017 B.Pusaka



Total Suara Pemilih: 1.714 Suara

Sumber data: Olahan Penulis Tahun 2018.

Ketiga adalah Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. wawancara yang penulis

juga mulai tau bahwa beliau sosok seseorang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dampaknya yang ia dapatkan pada tahun 2017 ketidakterpilihannya sebagai penghulu “ (Wawancara dengan sekretaris desa bapak saparudin 30 September 2018).

Karena dampak dari ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Penghulu Alfian, maka dampak Perolehan suara yang beliau dapatkan Pada Tahun 2017 :

lakukan terhadap penghulu alfian sebagai berikut :

“Cara yang saya lakukan dalam menerapkan norma-norma atau aturan-aturan hukum dari pemerintahan

¹³ Ibid.,hal: 13

maupun adat istiadat dengan cara pelan-pelan dan berangsur-angsur kita sosialisasikan kepada masyarakat. karena tidak semua masyarakat bisa terima. Dan aturan adat istiadat sudah mulai memudar, tetapi masih ada sedikit banyak nya kebiasaan-kebiasaan orang-orang dulu yang saya terapkan”. **(Wawancara dengan penghulu alfian, 30 September 2018).**

Sedangkan Apa yang disampaikan oleh penghulu alfian terhadap norma yang telah ia coba terapkan di Bangko Pusaka semasa kepemimpinan beliau berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh tokoh pemuda. Hasil Wawancara Sebagai berikut:

“ Menurut saya beliau dalam kepemimpinan nya melaksanakan aturan-aturan hukum pemerintah yang ada tidak secara penuh karena dapat dibuktikan pada asas keterbukaan (Transparansi) ADD dan DD terhadap masyarakat ini kurang ia lakukan. Akan tetapi untuk norma atau aturan adat istiadat melayu secara umum beliau masih pegang itu hingga kini “. **(Wawancara dengan tokoh pemuda M.Alfazri S.E, 2 Oktober 2018).**

C. PENUTUP

Kesimpulannya adalah *Pertama*, Kapasitas Managerial pada Penghulu Bangko Pusaka, Indikatornya yang terdiri dari

keahlian, profesionalisme, dan Keterampilan Kerja. Secara umum, berdasarkan hasil penelitian penulis untuk kapasitas managerial yang berhubungan dengan kinerja yang dilakukan oleh penghulu bangko pusaka tidak cukup baik, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya pengalaman beliau tentang organisasi sehingga dampaknya pada pembangunan desa yang kurang berkembang. *Kedua*, Kapasitas Politik yang dimiliki oleh Penghulu Bangko Pusaka yang berkaitan dengan legitimasi memiliki beberapa indikator. Yaitu: Kapasitas Regulatif, kapasitas Responsif, dan Kapasitas Simbolik. Berdasarkan hasil penelitian penulis baik melalui wawancara dan dokumentasi penulis dilapangan, hal yang penulis dapati atas kapasitas Politik Penghulu Bangko Pusaka terbilang kurang baik, hal ini disebabkan jaringan yang ia bangun di tengah-tengah masyarakat serta dengan pemerintah daerah kurang baik, sehingga legitimasi beliau juga kurang baik. *Ketiga*, Potensi Modal Sosial di Desa Bangko Pusaka (Jaringan, Kepercayaan, Norma-Norma) sebenarnya ada, akan tetapi belum sepenuhnya mampu digerakkan oleh Penghulu Alfian, akibatnya Pembangunan Desa bangko pusaka menjadi kurang optimal.

Saran yang dapat penulis berikan adalah pertama, Penghulu Bangko Pusaka Seharusnya dapat meningkatkan keahlian yang ia miliki dengan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan kepala desa. supaya dapat mendorong adanya kreasi serta inovasi dalam pembangunan desa bangko pusaka supaya lebih maju dan berkembang. *Kedua*, Penghulu

Bangko Pusaka Seharusnya dapat menjalankan aturan-aturan pemerintahan dengan baik dan konsisten. Salah satunya yaitu adanya keterbukaan (*Transparansi*) atas bergulirnya dana desa maupun alokasi dana desa. supaya dapat membangun kepercayaan dihadapan masyarakat desa bangko pusaka. Ketiga, Lembaga-lembaga desa dan masyarakat Desa Bangko Pusaka, Seharusnya melalui jenjang pendidikan yang dilalui serta pengalaman-pengalaman ke depan, dan pelatihan-pelatihan yang diikuti dapatlah meningkatkan pengetahuan lembaga desa dan masyarakat desa Bangko Pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Agus, Dwiyanto. 2010. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*,(yogyakarta:Penerbit Gava Media)
- Antlov, Hans. 2002. *Negara Dalam Desa (Patronase Kepemimpinan Lokal)*,Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Beddy Iriawan Maksudi.2012. *Sistem Politik Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki M.M.2002. *Metodologi Riset*.Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama.
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muntasib, Harini dkk.2017.*Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat dalam Pengembangan Ekowisata*. Bogor: IPB Press.
- Rusyan, Tabrani. 2018. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rusyan, Tabrani. 2018. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Salam, Setyawan Dharma.2004. *Managemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Managemen Sektor Publik*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Sevice.
- Silallahi, Ulber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sufianto, Dadang. 2016. *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro, Eko. 2013. *Daerah Inkuisif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*,(Yogyakarta: IRE)
- Sutoro, Eko. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*,(Yogyakarta: AMPD).
- Usma, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.

Vipriyanti, Utari

Nyoman. 2011. *Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

b. Jurnal :

Ayu Kusumastuti. 2016. *Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur*. Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya.

Budhi Cahyono. 2014. *Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Iyep Syaifulrahman. 2015. *Kepemimpinan Modal Sosial dan Pembangunan Desa. (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Garut..

Meditran R. Ontorael Tell, dkk. 2015. *Pengaruh Modal Sosial Masyarakat Pedesaan Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Fisip Universitas Hasanudin Makassar.

Melisia Olivia Mamarimbing. 2012. *Penerapan Prinsip-Prinsip GG dalam Pembangunan Fisik Desa Tateli I Kec Mandolang*. Fisip UNRAM.

Niken Handayani. 2016. *Modal Sosial dan Keberlangsungan Usaha. (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Keterkaitan Hubungan Modal Sosial Dengan Keberlangsungan Usaha Pengusaha Batik Di Kampung Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta)*. FISIP Universitas Sebelas Maret.

c. Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Desa..

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan Kepenghuluan..

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perangkat Kepenghuluan.